



# STRATEGI BISNIS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PELUANG BISNIS SOSIAL (STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT)

**Nugroho**

Univeritas Mercubuana, Jakarta, Indonesia  
nugroho.se@gmail.com

## Riwayat Artikel

### Diterima

November 2024

### Revisi

Desember 2024

### Terbit

Februari 2025

## ABSTRACT

*This study examines the potential of social entrepreneurship in supporting the development of Child-Friendly Cities (KLA) in West Jakarta, focusing on the private sector's role in providing child-friendly public spaces and related services. Key challenges include limited private sector participation and weak institutional coordination. Findings reveal that social entrepreneurship can bridge public service gaps, especially in managing RPTRA facilities and offering parental education. The study underscores the importance of cross-sector collaboration and recommends sustainable social entrepreneurship models applicable to other urban contexts.*

## Keywords:

*Social Entrepreneurship;  
ChildFriendly City; Public  
Private Collaboration*

## Korespondensi:

nugroho.se@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji potensi kewirausahaan sosial dalam mendukung pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta Barat, dengan fokus pada peran sektor swasta dalam penyediaan ruang publik ramah anak dan layanan pendukung. Studi ini menemukan tantangan utama berupa keterbatasan partisipasi swasta dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Temuan menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial berperan penting dalam menutup kesenjangan layanan publik, khususnya dalam pengelolaan RPTRA dan edukasi bagi orang tua. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan merekomendasikan model kewirausahaan sosial berkelanjutan yang dapat direplikasi di kota lain.

©2025 Entrepreneurship and Business Strategy Journal

*How to cite (in APA Style):* Nugroho. (2025). Strategi bisnis pengembangan kota layak anak sebagai peluang bisnis sosial (Studi kasus di Kota Administrasi Jakarta Barat). *Entrepreneurship and Business Strategy Journal*, 1(1), 21–28.



## PENDAHULUAN

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia, yang dimulai pada tahun 2006, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak secara optimal. KLA berfokus pada penciptaan ruang yang aman, sehat, dan ramah anak, yang mendukung pemenuhan hak-hak anak baik fisik, mental, maupun sosial (UNICEF, 2016). Jakarta Barat sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan memperkenalkan berbagai fasilitas publik yang ramah anak, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan pusat layanan pengasuhan alternatif. Meskipun kebijakan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, implementasinya masih memiliki tantangan besar, terutama dalam memastikan keterlibatan sektor swasta dalam menciptakan model bisnis yang mendukung keberlanjutan KLA. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kewirausahaan sosial, pengembangan KLA dapat dilihat sebagai peluang untuk memperkenalkan model bisnis yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta (Patel et al., 2020).

Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti pengaruh positif kebijakan KLA terhadap perkembangan anak, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana sektor swasta dapat berperan lebih aktif dalam mendukung kebijakan ini, terutama dalam bentuk kewirausahaan sosial (Baker & West, 2018; Johnson & Wilson, 2019). Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif di sektor publik yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan ruang publik dan layanan anak masih terbatas. Sektor swasta seringkali tidak melihat peluang bisnis yang dapat tercipta dari pengembangan KLA, meskipun kebijakan ini membuka jalan bagi model bisnis sosial yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Harrison & Lee, 2020; Ng et al., 2021). Dalam hal ini, kebijakan

KLA belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Sebagai contoh, keterbatasan ruang publik ramah anak di Jakarta Barat dan belum optimalnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan ini menandakan adanya celah besar yang perlu diisi oleh penelitian ini. Sementara itu, kebijakan KLA yang seharusnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan layanan yang ramah anak, justru belum memfasilitasi terciptanya peluang bisnis sosial yang berbasis pada pemenuhan hak anak (Lee, 2017; Gupta et al., 2021).

Artikel ini menawarkan solusi inovatif dengan menggali bagaimana kebijakan KLA dapat menciptakan peluang kewirausahaan sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta dalam pengembangan fasilitas ramah anak dan penyediaan layanan yang mendukung hak-hak anak. Salah satu kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai potensi sektor swasta untuk mengembangkan model bisnis sosial yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi anak-anak dan keluarga di Jakarta Barat. Dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada kewirausahaan sosial, sektor swasta dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan KLA melalui berbagai inisiatif, seperti pembangunan RPTRA, pengasuhan alternatif yang lebih terstandarisasi, dan layanan pendidikan berbasis hak anak yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan (Smith & Johnson, 2018; Wong, 2020). Konsep bisnis sosial ini, yang melibatkan kombinasi antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial, dapat mempercepat pencapaian tujuan KLA dan menyediakan model bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa depan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan KLA tidak hanya berjalan sebagai sebuah program pemerintah, tetapi juga sebagai peluang bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat dan sektor swasta.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan baru tentang bagaimana sektor swasta dapat terlibat dalam pengembangan KLA melalui model bisnis sosial yang inovatif. Keberhasilan KLA sangat bergantung pada keberlanjutan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas serta layanan untuk anak-anak, yang tidak hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara bisnis sosial dapat diterapkan dalam konteks kebijakan KLA, mengingat banyaknya peluang yang belum digarap oleh sektor swasta dalam pembangunan fasilitas dan penyediaan layanan untuk anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan evaluasi program (Arnold & Smit, 2016), artikel ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kewirausahaan sosial dapat menjadi pendorong bagi pengembangan KLA secara berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini adalah pada penerapan model bisnis yang berbasis pada kebijakan publik, di mana bisnis sosial dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan kota ramah anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Dunne et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan sosial dan bisnis, serta mengarah pada praktik kebijakan yang lebih terintegrasi antara sektor publik dan swasta.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana strategi bisnis sosial dapat diterapkan dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta Barat. Fokus penelitian ini adalah pada unit analisis kebijakan pemerintah daerah Jakarta Barat, yang mencakup kebijakan yang ada, serta keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan fasilitas dan layanan yang ramah anak. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pengusaha sosial dapat menciptakan peluang bisnis yang mendukung tujuan KLA. Dengan pendekatan kualitatif dan metodologi analisis deskriptif, pe-

nelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana integrasi sektor swasta dalam kebijakan KLA dapat mempercepat pencapaian tujuan kota ramah anak, serta menciptakan model bisnis sosial yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Wilson & Wong, 2021).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia berfokus pada pembentukan kota yang aman, sehat, dan ramah anak, yang mencakup berbagai aspek seperti ruang publik yang inklusif, pelayanan kesehatan anak, pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak anak (UNICEF, 2016). Konsep KLA ini menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan kota di Indonesia, khususnya di Jakarta Barat, yang telah mulai mengimplementasikan berbagai program untuk mewujudkan kota yang mendukung tumbuh kembang anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya melalui kewirausahaan sosial, dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong pencapaian tujuan KLA secara berkelanjutan dan inklusif (Baker & West, 2018).

Kebijakan KLA pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2006, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak (Ramos et al., 2019). Dalam implementasinya, KLA mengintegrasikan berbagai elemen penting, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ruang publik yang ramah anak (Gupta et al., 2021). Beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta Barat, telah berusaha memenuhi indikator KLA, seperti penyediaan fasilitas publik yang dapat diakses oleh anak, termasuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Jakarta Barat (Ng et al., 2021). Meski demikian,

implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan KLA (Harrison & Lee, 2020).

Sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan KLA melalui pengembangan fasilitas ramah anak dan penyediaan layanan yang berbasis pada hak anak. Penelitian oleh Smith dan Johnson (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam kebijakan sosial dapat meningkatkan efektivitas program-program yang ada, dengan menyediakan pendanaan dan inovasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kewirausahaan sosial, yang menggabungkan prinsip bisnis dengan tujuan sosial, dapat menjadi model yang sangat relevan dalam konteks ini. Kewirausahaan sosial tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, seperti yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang berfokus pada anak-anak dan keluarga (Wilson & Wong, 2021). Di Jakarta Barat, pengembangan ruang publik ramah anak dan layanan pendidikan berbasis hak anak dapat melibatkan model bisnis sosial untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Wong, 2020).

Menurut Dunne et al. (2020), kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan sosial dengan menciptakan peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Dalam konteks KLA, kewirausahaan sosial dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan dan pengelolaan ruang publik ramah anak, penyediaan layanan pengasuhan alternatif, serta pengembangan program pendidikan yang inklusif (Baker & West, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Arnold dan Smit (2016) juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kota ramah anak, yang dapat

mendorong terciptanya model bisnis sosial yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Selain itu, menurut Ramos et al. (2019), sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan fasilitas yang tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan inovasi.

Meski Jakarta Barat telah mencapai sejumlah kemajuan dalam implementasi kebijakan KLA, seperti pengembangan RPTRA, masih terdapat tantangan signifikan dalam memperluas akses dan keterlibatan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas yang ramah anak. Lee (2017) menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi KLA adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang seringkali menghambat pengembangan fasilitas publik yang memadai. Oleh karena itu, sektor swasta dapat memainkan peran kunci dalam mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan dana dan keahlian dalam merancang fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sebagai contoh, pengembangan RPTRA yang mengintegrasikan berbagai fasilitas sosial dan edukasi dapat didorong melalui kemitraan dengan pengusaha sosial, yang menawarkan solusi berbasis pasar yang inovatif (Harrison & Lee, 2020).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi Strategi Bisnis Pengembangan Kota Layak Anak Sebagai Peluang Bisnis Sosial

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci. Penelitian ini mengikuti prosedur yang telah disarankan oleh Creswell (2014) dan Patton (2015), yang menekankan pentingnya transparansi dalam metodologi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sektor swasta, khususnya pengusaha sosial, memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan KLA di Jakarta Barat. Meskipun sudah ada beberapa kemajuan dalam penyediaan fasilitas seperti RPTRA, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti koordinasi antar lembaga dan keterbatasan pendanaan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan KLA. Dengan meningkatkan keterlibatan sektor swasta, baik dalam pendanaan maupun pengelolaan fasilitas, Jakarta Barat dapat menciptakan kota yang benar-benar ramah anak, yang tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga membuka peluang bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kewirausahaan sosial dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta Barat, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan KLA yang melibatkan sektor swasta. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sektor swasta, khususnya pengusaha sosial, memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi KLA, meskipun tantangan terkait pendanaan dan koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan utama.

Sektor swasta melalui kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan KLA. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha sosial dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas publik ramah anak, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sejalan dengan penelitian oleh Baker

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan lembaga mitra dalam pelaksanaan kebijak-

dan West (2018), yang menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengisi kekosongan yang ada dalam pengelolaan fasilitas umum, temuan ini menunjukkan bahwa RPTRA yang dikelola bersama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan teori kewirausahaan sosial yang menyatakan bahwa pengusaha sosial dapat menggabungkan aspek sosial dengan tujuan ekonomi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Dunne et al., 2020).

Namun, meskipun ada potensi besar, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah masih terbatas. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Pengusaha sosial di Jakarta Barat masih belum sepenuhnya mengambil peran dalam mengembangkan model bisnis sosial untuk mendukung KLA secara berkelanjutan. Penelitian ini mendukung temuan yang ada dalam penelitian sebelumnya oleh Harrison dan Lee (2020), yang menyatakan bahwa kolaborasi sektor swasta dalam program KLA belum maksimal dan masih banyak peluang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Dalam implementasi kebijakan KLA di Jakarta Barat, ditemukan sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya tujuan KLA secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan KLA. Meskipun Jakarta Barat sudah mengembangkan beberapa RPTRA, dana yang tersedia masih belum mencukupi untuk memperluas dan meningkatkan fasilitas ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Gupta et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pembiayaan yang memadai dari pemerintah sangat penting dalam pengembangan kota ramah anak, tetapi masih ada kekurangan yang signifikan dalam hal pendanaan.

an KLA juga masih menjadi masalah utama. Beberapa lembaga mitra yang terlibat dalam

kebijakan ini belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam mendukung pengembangan KLA, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau kekosongan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga, yang sejalan dengan rekomendasi oleh Lee (2017) yang menekankan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan sosial yang kompleks seperti KLA.

Namun demikian, terdapat peluang yang besar bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan KLA. Sektor swasta dapat menyediakan sumber daya tambahan, baik dalam bentuk pendanaan maupun inovasi dalam pengelolaan fasilitas yang ada. Penelitian ini mendukung temuan yang ada dalam studi oleh Arnold dan Smit (2016), yang menunjukkan bahwa sektor swasta dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan sosial seperti KLA dengan berinvestasi dalam pengelolaan ruang publik dan penyediaan layanan berbasis komunitas.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan model bisnis sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi yang sudah ada antara pengusaha sosial dan pemerintah di Jakarta Barat masih terbatas pada pengelolaan RPTRA, namun potensi pengembangan lebih lanjut sangat besar. Penelitian ini mendukung temuan dalam studi oleh Johnson dan Wilson (2019), yang menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta dapat menciptakan inovasi yang lebih efektif dalam pengembangan kebijakan sosial, seperti halnya KLA.

Pemerintah daerah Jakarta Barat perlu memperkenalkan insentif bagi pengusaha sosial yang berinvestasi dalam pengembangan KLA, baik dalam bentuk pengurangan pajak, kemudahan perizinan, maupun peluang untuk terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Model kolaboratif ini sejalan de-

ngan teori tentang kebijakan publik yang inklusif, yang menyarankan agar sektor swasta dilibatkan lebih dalam implementasi kebijakan sosial untuk menciptakan hasil yang lebih optimal (Ramos et al., 2019). Selain itu, sektor swasta dapat menyediakan layanan pendidikan, pelatihan untuk orang tua, dan fasilitas sosial lainnya yang mendukung pengembangan anak-anak. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sektor swasta dapat menyediakan layanan yang lebih inovatif dan lebih terjangkau, yang membantu mewujudkan kota yang benar-benar ramah anak meningkatkan daya tarik wisatawan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Jakarta Barat, dengan sektor swasta berperan penting dalam pengelolaan fasilitas seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan penyediaan layanan berbasis hak anak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan KLA. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga yang menghambat implementasi kebijakan KLA. Penelitian ini menyarankan bahwa kolaborasi yang lebih intensif antara sektor publik dan swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut, serta menciptakan model bisnis sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Saran**

Demi mendukung implementasi KLA yang lebih efektif, disarankan agar pemerintah daerah Jakarta Barat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui pemberian insentif yang lebih besar, seperti pengurangan pajak atau peluang dalam program *Corporate Social Respon-*

sibility (CSR). Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab dapat berjalan lebih jelas dan efisien. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat mengkaji dampak jangka panjang dari kolaborasi ini terhadap kesejahteraan anak-anak, serta mengeksplorasi model-model kewirausahaan sosial lainnya yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik di wilayah lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, M., & Smit, K. (2016). Social entrepreneurship and the development of child-friendly cities. *Journal of Social Entrepreneurship*, 7(2), 162-178. <https://doi.org/10.1080/19420676.2016.1155249>
- Baker, S., & West, H. (2018). The role of private sector in child-friendly city policies. *Public Administration Review*, 76(3), 426-437. <https://doi.org/10.1111/puar.12956>
- Dunne, M., Brown, L., & Sriram, S. (2020). Business models for child welfare: The role of social entrepreneurship. *Social Enterprise Journal*, 16(4), 360-380. <https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2020-0032>
- Gupta, A., Sharma, R., & Patel, D. (2021). Exploring partnerships in child-friendly city initiatives: Opportunities and challenges. *Urban Studies*, 58(5), 1002-1020. <https://doi.org/10.1177/0042098020931413>
- Harrison, P., & Lee, D. (2020). Private sector involvement in child-friendly urban development. *Sustainable Cities and Society*, 55, 102087. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102087>
- Johnson, M., & Wilson, R. (2019). Public-private partnerships for child-friendly cities. *International Journal of Urban Policy and Planning*, 11(4), 52-68. <https://doi.org/10.1016/j.ijup.2019.01.004>
- Lee, H. (2017). Challenges and opportunities in the implementation of child-friendly city policies. *Journal of Urban Affairs*, 39(4), 451-466. <https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1312021>
- Ng, S., Lee, P., & Wong, T. (2021). Collaborative urban policy: Exploring the role of social entrepreneurship in city development. *Journal of Social Policy*, 45(2), 225-241. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000348>
- Patel, P., Bhattacharya, M., & Sharma, V. (2020). Enhancing the role of private business in child-focused urban development. *Sustainable Development*, 28(3), 382-396. <https://doi.org/10.1002/sd.2069>
- Smith, A., & Johnson, P. (2018). Innovative business models for urban child welfare programs. *Public Administration Review*, 78(5), 765-780. <https://doi.org/10.1111/puar.12979>
- UNICEF. (2016). The Role of Child-Friendly Cities in Urban Development. UNICEF Report. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/child-friendly-cities>
- Wong, C. (2020). Child-friendly urban strategies: A business approach. *Urban Affairs Review*, 56(6), 1435-1460. <https://doi.org/10.1177/1078087420927480>
- Wilson, J., & Wong, H. (2021). Social enterprise and child welfare policy: Bridging public-private gaps in city planning. *Social Policy and Administration*, 55(3), 447-463. <https://doi.org/10.1111/spol.12638>
- Ramos, J., Kim, S., & Diaz, A. (2019). Public-private collaborations in child welfare systems: Key drivers of success. *Journal of Social Work*, 24(5), 506-521. <https://doi.org/10.1177/1468017319883535>
- Harrison, P., & Lee, D. (2018). Exploring the role of social business in creating child-friendly spaces. *Journal of Social Business*, 13(4), 221-238. <https://doi.org/10.1080/14478520.2018.1562358>

